

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
(RPS)

Program Studi	: S1 PPKn	Mata Kuliah/Kode	: PKn /PAM0032
Prasyarat	:	SKS	: 2 sks
Deskripsi Mata Kuliah	<p>: Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Pamulang (UNPAM). Cakupan materi yang akan dipelajari oleh mahasiswa dalam mata kuliah ini, meliputi; a. Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan; b. Identitas</p>		
		Capaian Pembelajaran	: Mahasiswa mampu menganalisis urgensi PKn, Identitas nasional, Integrasi nasional, konstitusi, nilai dan norma konstitusional, hak dan kewajiban warga negara, demokrasi, negara hukum, penegakkan HAM, wawasan nusantara, geopolitik Indonesia, ketahanan nasional, PKn sebagai upaya mengatasi radikalisme dan korupsi dan anti korupsi dalam berbagai perspektif keilmuan.

nasional; c. Integrasi nasional; d. Konstitusi di Indonesia; e. Nilai dan Norma Konstitusional; f. Hak dan Kewajiban warga Negara; g. Demokrasi; h. Indonesia sebagai Negara Hukum; i. Penegakan HAM di Indonesia; j. Wawasan Nusantara; k. Geopolitik Indonesia; l. Ketahanan nasional dan bela Negara; m. PKn mengatasi radikalisme; dan n, Korupsi dan anti-Korupsi.

Penyusun : Tim MKWU

PERTEMUAN KE-	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN	BAHAN KAJIAN (MATERI AJAR)	METODE PEMBELAJARAN	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	KRITERIA PENILAIAN	BOBOT NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mampu mengkaji dan memetakan urgensi pentingnya pendidikan kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter di PT	1. Latar belakang dan tujuan pembelajaran Kewarganegaraan sebagai pendidikan karakter di PT 2. Sumber historis, sosiologis dn politk tentang pndidikan kewarganegaraan 3. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangn pendidikan kewarganegaraan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ceramah ▪ Tanya jawab ▪ Diskusi 	Tugas dan latihan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keterlibatan dalam proses perkuliahan. ▪ Partisipasi dalam diskusi. ▪ Sikap menghormati pendapat orang lain. 	10%

2	Mampu menafsirkan identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan dan karakter bangsa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian Identitas Nasional 2. Karakteristik Identitas Nasional 3. Sejarah kelahiran paham nasionalisme Indonesia 4. Pancasila sebagai kepribadian dan Identitas Nasional 5. Karakter bangsa Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ceramah ▪ Case study ▪ Diskusi 	Tugas dan latihan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keterlibatan dalam proses perkuliahan. ▪ Partisipasi dalam diskusi. ▪ Sikap menghormati pendapat orang lain. 	10%
3	Mampu menguraikan urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian Integrasi Nasional 2. Jenis-jenis Integrasi (vertikal dan horisontal) 3. Potensi disintegrasi di Indonesia 4. Strategi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ceramah ▪ Case study ▪ Diskusi 	Tugas dan latihan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keterlibatan dalam proses perkuliahan. ▪ Partisipasi dalam diskusi. ▪ Sikap menghormati 	10%

		integrasi di Indonesia			pendapat orang lain.	
4	Mampu menganalisis dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian Negara dan konstitusi 2. Unsur, bentuk dan tujuan Negara 3. UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ceramah ▪ Small group 	Tugas dan latihan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keterlibatan dalam proses perkuliahan. ▪ Partisipasi dalam diskusi. ▪ Sikap menghormati pendapat orang lain. 	5%
5	Mampu menafsirkan nilai dan norma konstitusional UUD NRI 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sejarah Konstitusi di Indonesia 2. Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia 3. Perilaku berkonstitusional 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Problem base learning and Inquiry (PBL) 	Tugas dan latihan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keterlibatan dalam proses perkuliahan. ▪ Partisipasi dalam diskusi. ▪ Sikap 	5%

	UUD				menghormati pendapat orang lain.	
6	Mampu menganalisis dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian hak dan kewajiban warga negara 2. Hak dan kewajiban warga Negara menurut UUD 1945 3. Pelaksanaan hak dan kewajiban warganegara 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ceramah ▪ Small group discussion 	Tugas dan latihan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keterlibatan dalam proses perkuliahan. ▪ Partisipasi dalam diskusi. ▪ Sikap menghormati pendapat orang lain. 	5%
7	Mampu menganalisis dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari pancasila	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian demokrasi 2. Prinsip-prinsip dan nilai demokrasi 3. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ceramah ▪ Small group discussion 	Tugas dan latihan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keterlibatan dalam proses perkuliahan. ▪ Partisipasi dalam diskusi. 	5%

		demokrasi yang bersumber dari pancasila			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sikap menghormati pendapat orang lain. 	
UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)						
8	Mampu menganalisis penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia	1. Makna Indonesia sebagai negara hukum dan prinsip-prinsipnya 2. Hubungan negara hukum dengan HAM	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ceramah ▪ Small group discussion 	Tugas dan latihan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keterlibatan dalam proses perkuliahan. ▪ Partisipasi dalam diskusi. ▪ Sikap menghormati pendapat orang lain. 	5%
9	Mampu menganalisis penegakan HAM yang berkeadilan di	1. HAM dalam hukum nasional 2. Penegakan HAM di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ceramah ▪ Small group discussion 	Tugas dan latihan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keterlibatan dalam proses perkuliahan. 	5%

	Indonesia	3. Penegakkan dan perlindungan HAM sebagai perwujudan kemanusiaan yang adil dan beradab			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Partisipasi dalam diskusi. ▪ Sikap menghormati pendapat orang lain. 	
10	Mampu mengkaji dinamika historis, dan urgensi wawasan nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan indonesia dalam konteks pergaulan dunia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian wawasan nusantara 2. Faktor yang mempengaruhi wawasan nusantara 3. Batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 4. Unsur-unsur dasar wawasan nusantara. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ceramah ▪ Small group discussion 	Tugas dan latihan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keterlibatan dalam proses perkuliahan. ▪ Partisipasi dalam diskusi. ▪ Sikap menghormati pendapat orang lain. 	5%

11	Mampu menguraikan Geopolitik Indonesia Dalam Wujud Wawasan Nusantara	1. Wilayah sebagai ruang hidup bangsa 2. Wawasan nusantara sebagai pandangan geopolitik bangsa Indonesia 3. Implementasi wawasan nusantara	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ceramah ▪ Small group discussion 	Tugas dan latihan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keterlibatan dalam proses perkuliahan. ▪ Partisipasi dalam diskusi. ▪ Sikap menghormati pendapat orang lain. 	5%
12	Mampu menafsirkan ketahanan nasional dan bela Negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kebangsaan	1. Pengertian dan Konsep Ketahanan Nasional dan Bela Negara. 2. Sifat Ketahanan Nasional dan Nilai Bela Negara 3. Dinamika dan tantangan Ketahanan Nasional dan Bela	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ceramah ▪ Small group discussion 	Tugas dan latihan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keterlibatan dalam proses perkuliahan. ▪ Partisipasi dalam diskusi. ▪ Sikap menghormati pendapat 	10%

		Negara 4. Urgensi Ketahanan Nasional dan Bela negara			orang lain.	
13	Mampu mengkaji dan menganalisis Peran PKn sebagai upaya mengatasi radikalisme	1. Gerakan terorisme 2. Pengertian radikalisasi dan terorisme 3. Faktor penyebab munculnya radikalisme 4. Peran PKn dalam mengatasi gerakan radikalisme	Problem base learning and Inquiry (PBL)	Tugas dan latihan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keterlibatan dalam proses perkuliahan. ▪ Partisipasi dalam diskusi. ▪ Sikap menghormati pendapat orang lain. 	10%
14	Menganalisis dan membedakan perbuatan korupsi dan perilaku koruptif	1. Pengertian Korupsi 2. Faktor- Faktor Penyebab Korupsi. 3. Bentuk Korupsi dan	Problem base learning and Inquiry (PBL)	Tugas dan latihan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keterlibatan dalam proses perkuliahan. 	10%

	di masyarakat.	Perilaku Koruptif.			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Partisipasi dalam diskusi. ▪ Sikap menghormati pendapat orang lain. 	
UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)						

Referensi:

Alfandi, Widoyo. (2002). Reformasi Indonesia : Bahasan dari Sudut Pandang Geografi Politik dan Geopolitik. Yogyakarta : Gajah Mada University.

Andrea, Fockema. (1951). Rechtsgeleerd Handwoordenboek, Groningen – Djakarta, Bij J B Wolter Uitgevermaatschappij, 1951 (Kamus Hukum, terjemahan), Bandung: Bina Cipta.

Armawi, A. (2012). Karakter sebagai Unsur Kekuatan Bangsa. Makalah disajikan dalam “Workshop Pendidikan Karakter bagi Dosen Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi”, tanggal 31 Agustus – 2 September 2012 di Jakarta

- Arsyad, Aprillani (2010). Pandangan Agama Islam Mengenai Terorisme, Kekerasan, dan Jihad. Inovatif. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 4 Tahun 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. (1994). Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, Jakarta: Ichtiar Baru-van Hoeve
- Asshiddiqie, Jimly. (2005). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Setjen MKRI.
- Asshiddiqie, Jimly. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid 1, Jakarta: Setjen MKRI.
- Asshiddiqie, Jimly. (2019). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers
- Azra, Azyumardi. (2005). Pendidikan Kewargaan untuk Demokrasi di Indonesia. UNISIA, Jurnal No.57/XXVIII/III/2005
- Bahri, Syamsul. (2008). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi dan Modus Korupsi APBD di Malang Raya. Manajemen, Akuntansi dan Bisnis, Jurnal, Vol.6, No.1 April 2008.
- Baramuli, A. (1992). Pemikiran Rousseau dalam Konstitusi Amerika Serikat, Jakarta: Yayasan Sumber Agung.
- Besar (2016). Hubungan Pancasila dan Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia.
- Budiardjo, Miriam. (2008). Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT Gramedia.
- Chaidir, Ellydar. (2007). Hukum dan Teori Konstitusi. Yogyakarta: Kreasi Total Media Yogyakarta
- Cristine, dkk,. (2002). Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: PT Prandnya Paramita.
- Darmaputra. (1988). Pancasila Identitas dan Modernitas: Tinjauan Etis dan Budaya. Jakarta: PT. Gunung Mulia.

- Depdiknas. (2006), Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sekolah Dasar dan Menengah. Jakarta: Depdiknas
- DosenPPKn.com. (tanpa Tahun). Pengertian Identitas Nasional, Karakteristik dan Fungsi.
- Dwi, Winarno. (2010). Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA/SMK. Karanganyar: Dino Mandiri.
- El Muhtaj, Majda. (2013). Dimensi-Dimensi HAM : Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Depok : Raja Grafindo Persada.
- Funani, Fuad A. (2013). Fenomena Radikalisme di Kalangan Kaum Muda. Maarif. Jurnal. Vol. 8, No. 1 Juli 2013.
- Hadimulyo. (2004). Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Hamid, Abdul. dkk. (2012). Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Bandung: Pustaka Setia.
- Hamzah, Andi. (2002). Pemberantasan Korupsi Ditinjau dari Hukum Pidana. Jakarta: Pusat Hukum Pidana Universitas Trisakti.
- Harahap, Krisna, (tanpa tahun). Konstitusi Republik Indonesia Sejak Proklamasi Hingga Reformasi. Bandung: PT. Grafiti Budi Utami
- Harsawaskita, A. (2007). Great Power Politics di Asia Tengah Suatu Pandangan Geopolitik, dalam Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional. Bandung: Graha Ilmu.
- Hartanti, Evi. (2008). Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayat, Mardiyono (1983). Geopolitik, Teori dan Strategi Politik dalam Hubungannya dengan Manusia, Ruang dan Sumber Daya Alam. Surabaya : Usaha Nasional.
- Indra. 2007. Mexsasai, Komisi Konstitusi Indonesia (Perbandingannya Dengan Beberapa Negara), Jurnal Konstitusi, ISSN 1829-8095, Volume 1 Nomor 1, Media Komunikasi Ilmu Hukum dan HAM.
- Ismail dan Hartati, Sri. (2020). Pendidikan Kewarganegaraan, Cet.1, Pasuruan: CV. Qiara Media.

- Johan, Nasution B. (2017). Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Kaelan. (2007). Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kaelan dan Zubaidi, H. Ahmad (2007). Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Yogyakarta: Penerbit Paradigma.
- Kalidjernih, F.K. (2010). Kamus Studi Kewarganegaraan: Perspektif Sosiologikal dan Politikal. Bandung: Widya Aksara Press.
- Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.
- Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).
- Kusnardy, Moh & Harmaily, Ibrahim. (1983). Pengantar Tata Hukum Negara Indonesia, Jakarta: FH UI
- Krannenburg (1975). Ilmu Negara Umum. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Laurensius, Arliman S. (2020). Pendidikan Kewarganegaraan, Yogyakarta: Deepublish.
- Laurensius, Arliman S. (2020). Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Revolusi 4.0, Ensiklopedia Sosial Review, Volume 2, Nomor 3, 2020.
- Lestari, E.Lilis dan Arifin, Ridwan. (2019). Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Komunikasi Hukum. Jurnal. Vol. 5 No. 2, Agustus 2019.
- Lubis A, Maulana. (2018). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Demokrasi yang Berkarakter.
- Mahfud MD, M. (2000). Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Mahfud MD, M. (2001). Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Jakarta: PT Rineka Cipta.

- Mulyono, Budi. (2018). Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMP: Tinjauan Filosofis, Sosiologis, Yuridis dan Psikologis. *Citizenship, Jurnal* Vol.1, No. 2 Tahun 2018.
- Modul Kuliah Kewarganegaraan. (2012). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Nasution, A.B. (1995). Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio- Legal Atas Konstituante 1956-1959, Penerjemah Sylvia Tiwon, Cet.pertama, Jakarta: PT. Intermasa.
- Nurjannah. (2013). Faktor Pemicu Munculnya Radikalisme Islam Dalam Dakwah. *Dakwah. Jurnal* Vol. XIV, No. 2 tahun 2013.
- Nusarastrya, Haris Y. (2015). Radikalisme dan Terorisme di Indonesia Dari Masa Ke Masa (Tinjauan dari Perspektif Kewarganegaraan). Artikel.
- Paristiyanti.,dkk. (2016). Pendidikan Kewarganegaraan.Cetakan.1. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti.
- Pendidikan Kewarganegaraan.Cet.1. (2016). Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti.
- Pemerintah Indonesia. (2012). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Lembaran Negara RI Tahun 2012, Nomor 158. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2005). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pendidikan Tentang Guru dan Dosen. Lembaran Negara RI Tahun 2005, Nomor 4301. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2001). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

- Pemerintah Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara RI Tahun 2003, Nomor 78 Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perppu 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45.
- Pemerintah Indonesia. (2005). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Lembaran Negara RI Nomor 118.
- Pemerintah Indonesia. (2005). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Lembaran Negara RI Nomor 119, dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4558.
- Pemerintah Indonesia. (2000). Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Lembara Negara Nomor 208 Tahun 2000, Lembaran Negara RI Nomor 4026.
- Pemerintah Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Nomor 165.
- Pemerintah Indonesia. (2002). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- Pemerintah Indonesia (2008) Undang-Undang Dasar 1945, Cetakan II. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Puspito T, Nanang.,dkk. (2011). Pendidikan Anti Korupsi untuk PT. Jakarta: Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan kebudayaan RI.
- Pranowo, MB. (2010). Multidimensi Ketahanan Nasional. Jakarta: Pustaka Alfabet.
- Rahardjo, Satjipto. (2014). Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ranadireksa, H. (2007). Bedah Kostitusi Lewat Gambar Dinamika Konstitusi Indonesia, Bandung: Focusmedia.
- Riyanto, A. (2009). Teori Konstitusi, Bandung: Penerbit Yapemdo.

- Sabon, M.B. (1991). Fungsi Ganda Konstitusi, Suatu Jawaban Alternatif Tentang Tepatnya Undang-Undang Dasar 1945 Mulai Berlaku, Jakarta: PT Grafitri.
- Salim, Nur.,dkk. (2018). Pencegahan Paham Radikalisme dan Terorisme Melalui Pendidikan Multikulturalisme pada Siswa MAN Kediri I. Abdinus. Jurnal Vol. 2 No.1, Tahun 2018.
- Sartini.,dkk. (2002). Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Yogyakarta: Paradigma
- Subekti dan Tjitrosoedibio. (1973). Kamus Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sukardja, A. (1995). Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk, Jakarta: UI Press
- Samsuri. (2011). Kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan Era Reformasi di Indonesia. Cakrawala Pendidikan, Jurnal Edisi Khusus Dies Natalis UNY, Th XXX, No. 2 Mei 2011.
- Samsuri. (2008). Pengantar Sosiologi Kewarganegaraan. Diklat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonmoni, Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Santoso, Budi.,dkk. (2005). Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Siswanto, Didik. (tanpa tahun). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengatasi Gerakan Radikalisme. Artikel.
- Sularto, RB. (2018). Pengadilan HAM (AD HOC) Telaah Kelembagaan dan Kebijakan Hukum. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sunarso. (2009). Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia dari Rezim ke Rezim. Humanika, Jurnal Vol. 9 No. 1, Maret 2009.
- Suprayogi, dkk. (2018). Pendidikan Pancasila. Semarang : UNNES Press

- Sumarsono, S, et.al., (2001). Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Sunardi, R.M. (2004). Pembinaan Ketahanan Bangsa dalam Rangka Memperkokoh Keutuhan NKRI. Jakarta : Kuatemit Adidarma.
- Suradinata, Ermaya (1997). Paradigma Geopolitik. Jakarta : Lemhannas RI.
- Suradinata, Ermaya (2005). Hukum Dasar Geopolitik dan Geostrategi dalam Kerangka Keutuhan NKRI. Jakarta : Suara Bebas.
- Soemantri, Numan. (2001). Metode Mengajar Civics. Jakarta: Erlangga.
- Soemarsono.,dkk. (2001). Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Srijanti, Rahman, A.,K.S, Purwanto (2006) Etika Berwarga Negara. Jakarta : Salemba Empat.
- Tukiran. (2006). Materi Pendidikan Kewarganegaraan di PT dalam Menghadapi Tantangan Era Global. Cakrawala Pendidikan, Jurnal Vol. No. 3 November 2006 .
- Winarno. (2007). Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winataputra, Udin S. 2009. Pembelajaran PKn di SD. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Yunus, Faiz A (2017). Radikalisme, Liberalisme dan Terorisme: Pengaruhnya Terhadap Agama Islam. Studi Al'quran: Membangun Tradisi Berfikir Qur'ani, Jurnal: Vol. 13, No. 1, tahun 2017.

Sumber Internet:

<https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-radikalisme/>

www.dephan.go.id

<https://www.dosenpendidikan.co.id>

<https://en.fis.um.ac.id/pancasila-sebagai-nilai-nilai-demokratis-dalam-kehidupan-bangsa-negara/>

<https://eprints.uny.ac.id/26628/9/9/%20RINGKASAN%20SKRPSI.pdf>

<https://media.neliti.com/media/publications/25229-ID-hak-azasi-manusia-dan-hak-serta-kewajiban-warga-negara-dalam-hukum-positif-indon.pdf>